



TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN

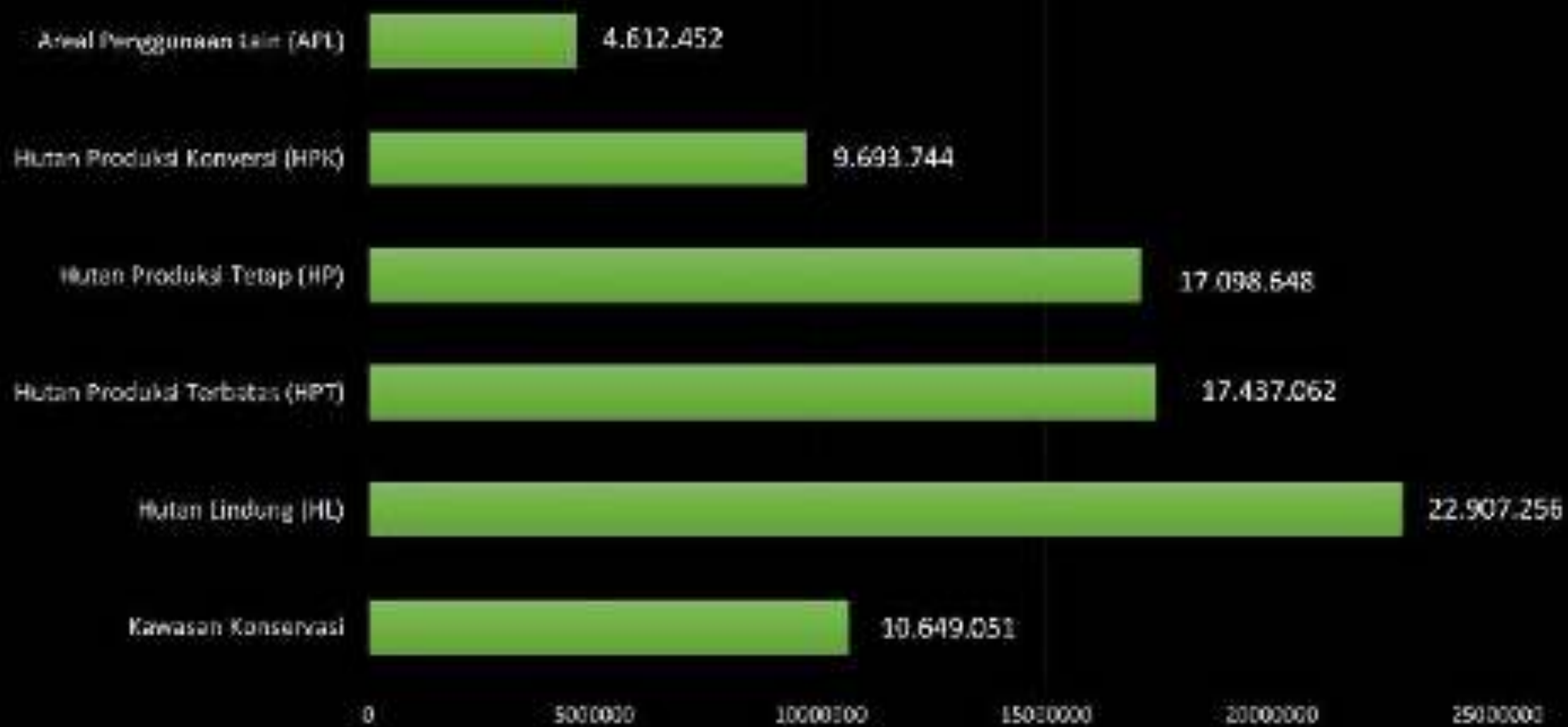
Forest Watch Indonesia, 2018

Twitter: @fwindonesia

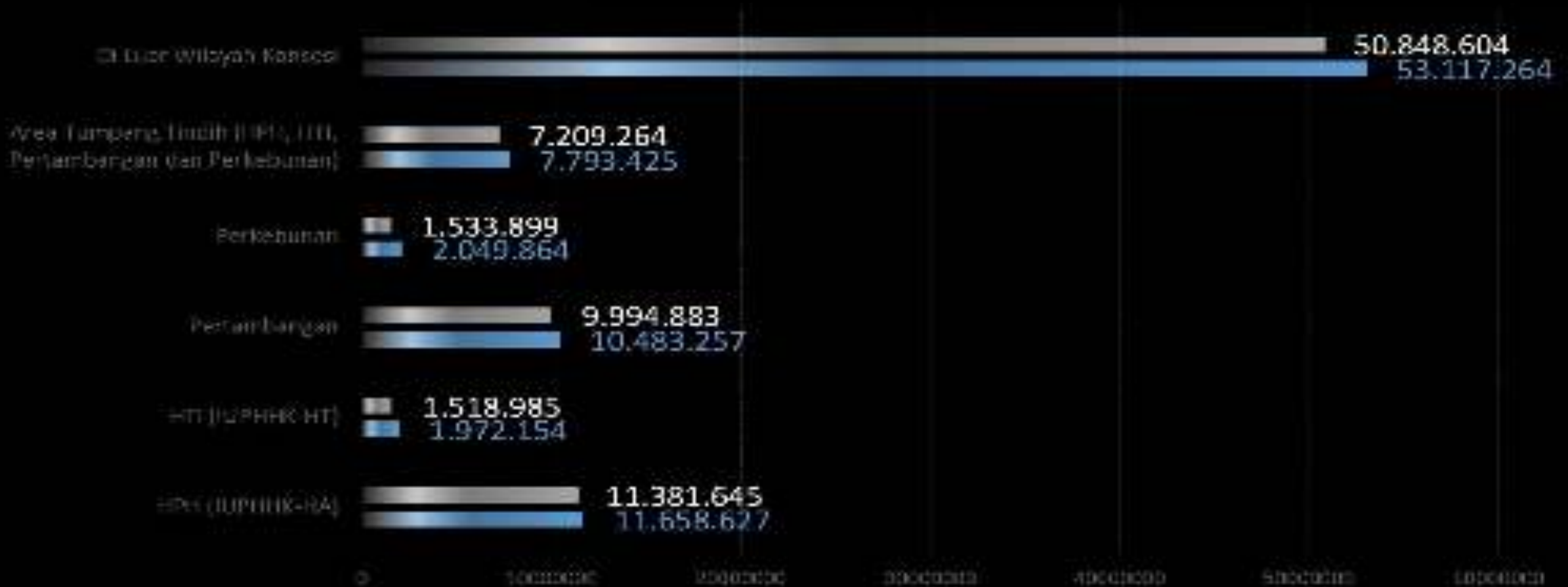
fanpage: Forest Watch Indonesia

Facebook: Pemantau Hutan

LUAS TUTUPAN HUTAN ALAM 2013 (HA)

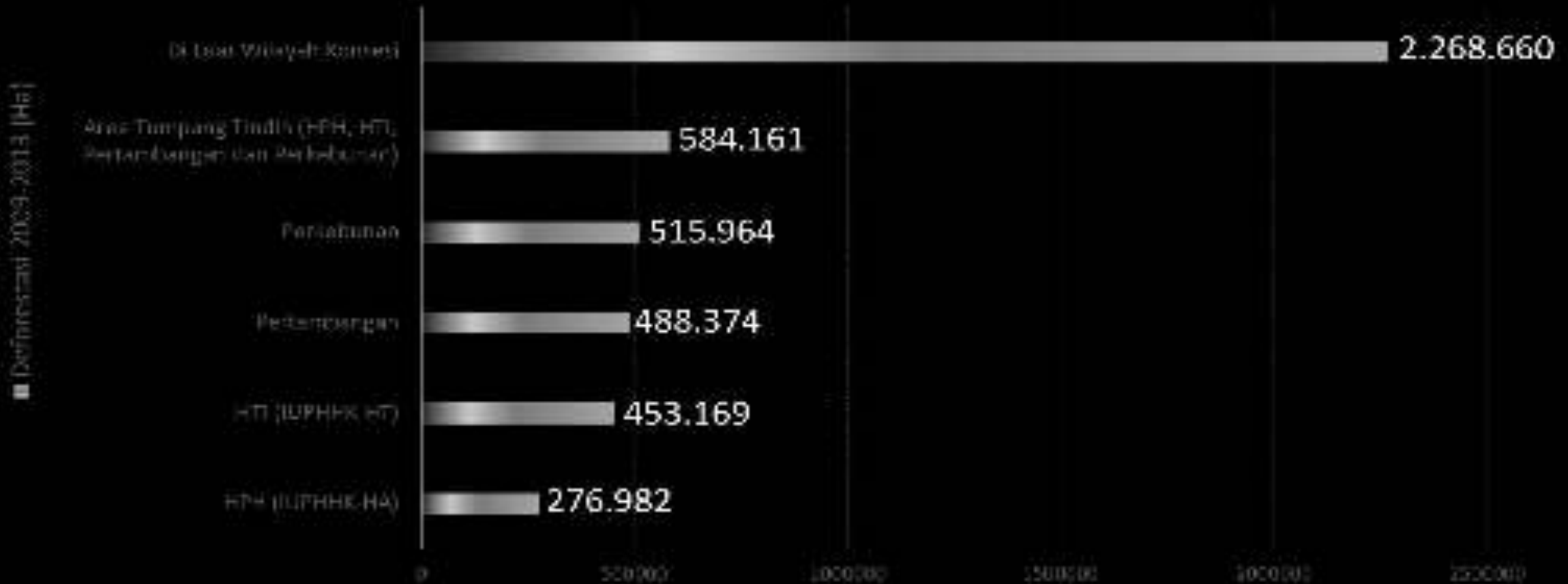


LUAS HUTAN ALAM DI DALAM DAN DILUAR KONSESI TAHUN 2009 DAN 2013



TOTAL TUTUPAN HUTAN ALAM 2009 - 87.074.590 HA
TUTUPAN HUTAN ALAM 2013 - 87.487.281 HA

Deforestasi tahun 2009-2013



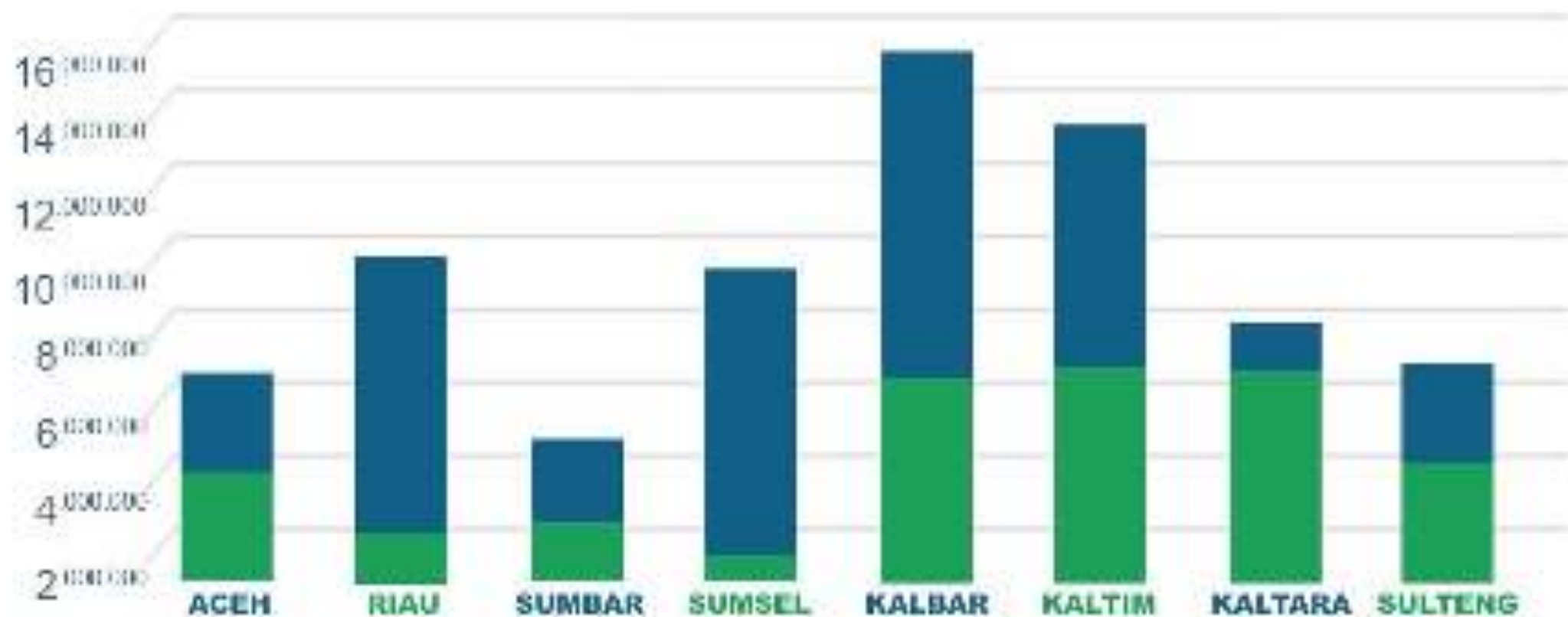
TOTAL DEFORESTASI 2009/2013 = 4.587.309 HA

Deforestasi di dalam perkebunan kelapa sawit setara dengan 22% total deforestasi di dalam wilayah konsesi. 63% atau 327,5 ribu ha di antaranya berada di dalam konsesi-konsesi perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan.

Sumber: FWI 2014

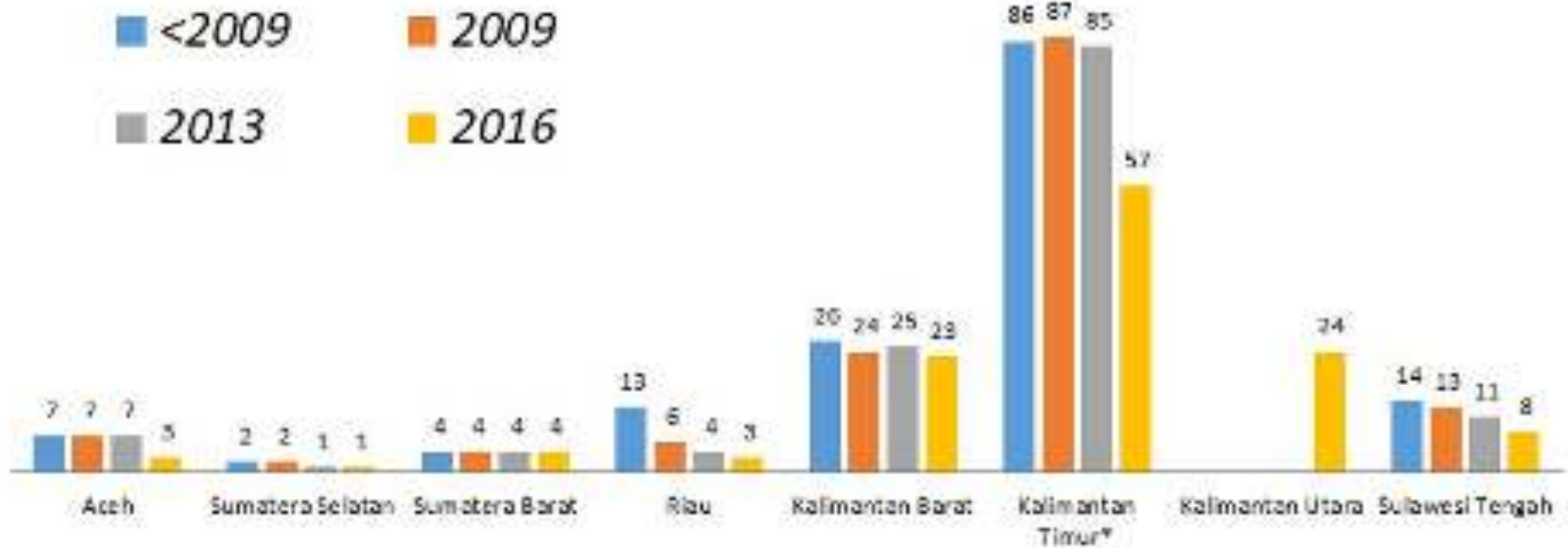
FAKTA KONDISI HUTAN 2009-2016

(Analisis sosial di 8 Provinsi:
Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
dan Sulawesi Tengah)

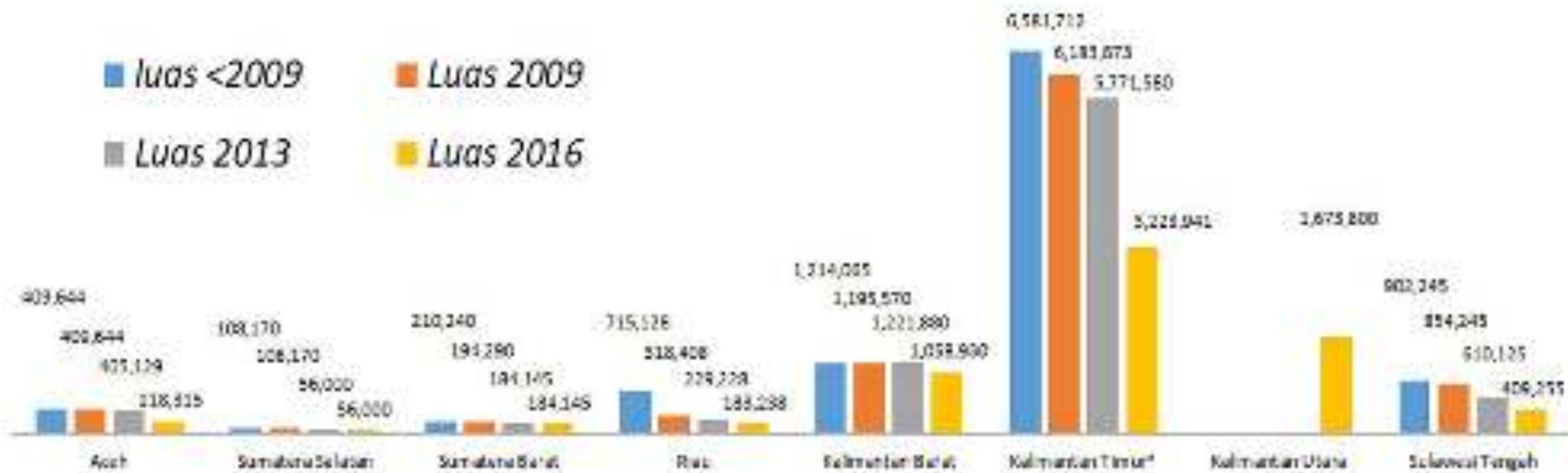


	ACEH	RIAU	SUMBAR	SUMSEL	KALBAR	KALTIM	KALTARA	SULTENG
HUTAN 2016	2,649,756	7,371,778	2,529,338	7,501,025	9,030,379	6,565,653	1,263,354	2,655,927
HUTAN ASLI 2009	2,963,344	1,476,343	1,644,019	738,111	5,530,656	5,899,461	5,718,262	3,364,045

UNIT HPH

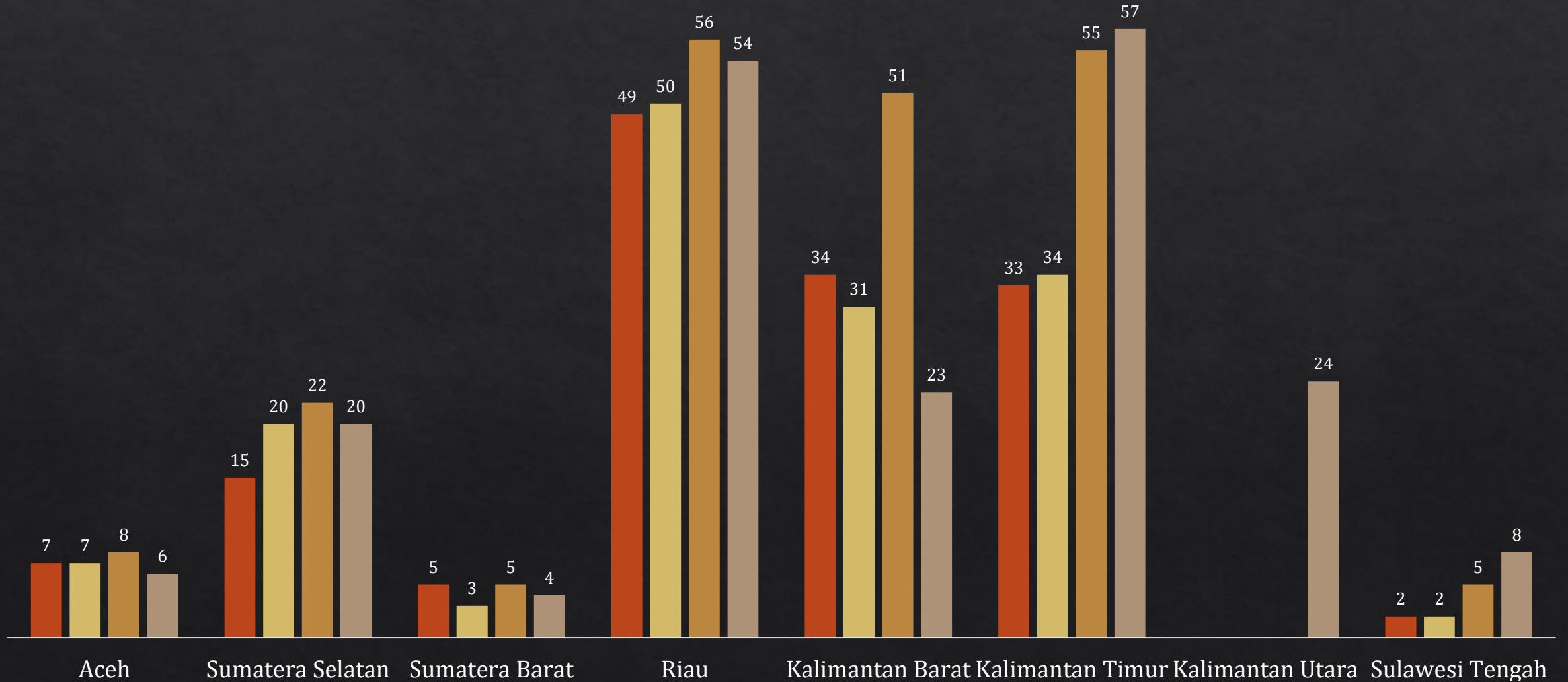


LUAS H P H

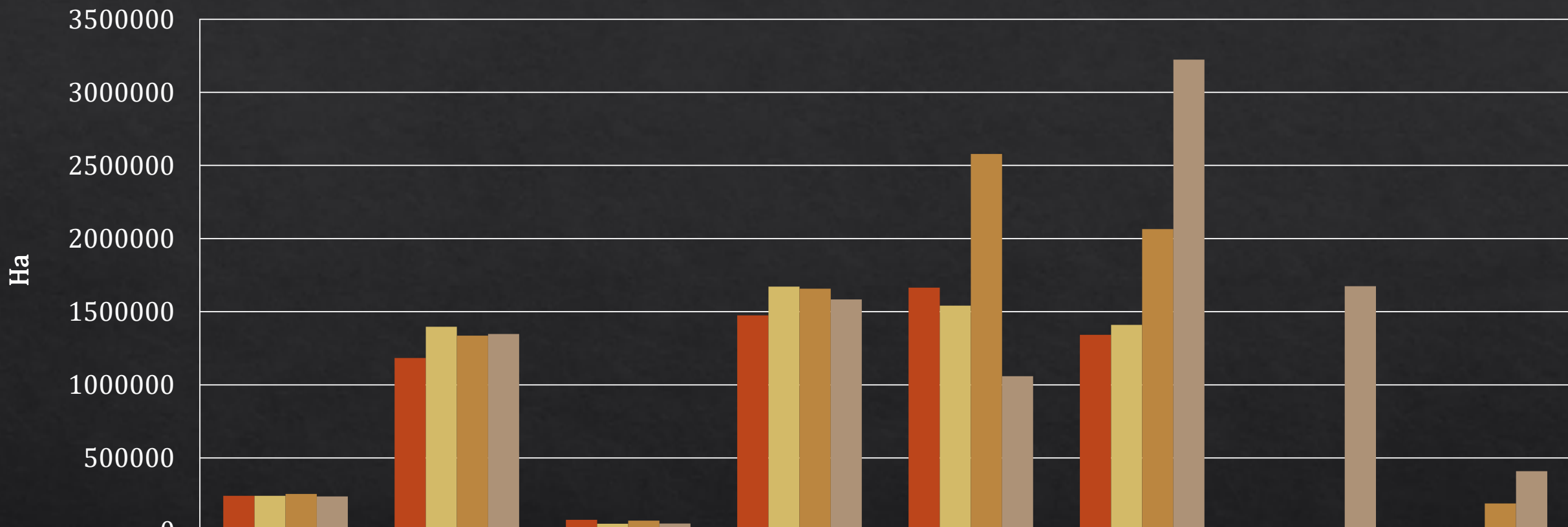


UNIT HTI

■ Unit <2009 ■ Unit 2013 ■ Unit 2013 ■ Unit 2016



LUAS HTI



	Aceh	Sumatera Selatan	Sumatera Barat	Riau	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Sulawesi Tengah
■ LUAS < 2009	241170	1184115	77100	1474937	1664981	1342109		18700
■ LUAS 2009	241,170.00	1,396,632.0	50,649.00	1,671,267.0	1,541,181.0	1,409,686.0		18,700.00
■ LUAS 2013	254,308	1,336,802	71,556	1,656,897	2,578,640	2,064,658		189,572
■ LUAS 2016	237,214	1,346,950	51,464	1,583,335	1,058,930	3,223,941	1,673,800	409,255



DEFORESTASI 2009 – 2016 DI 8 PROVINSI

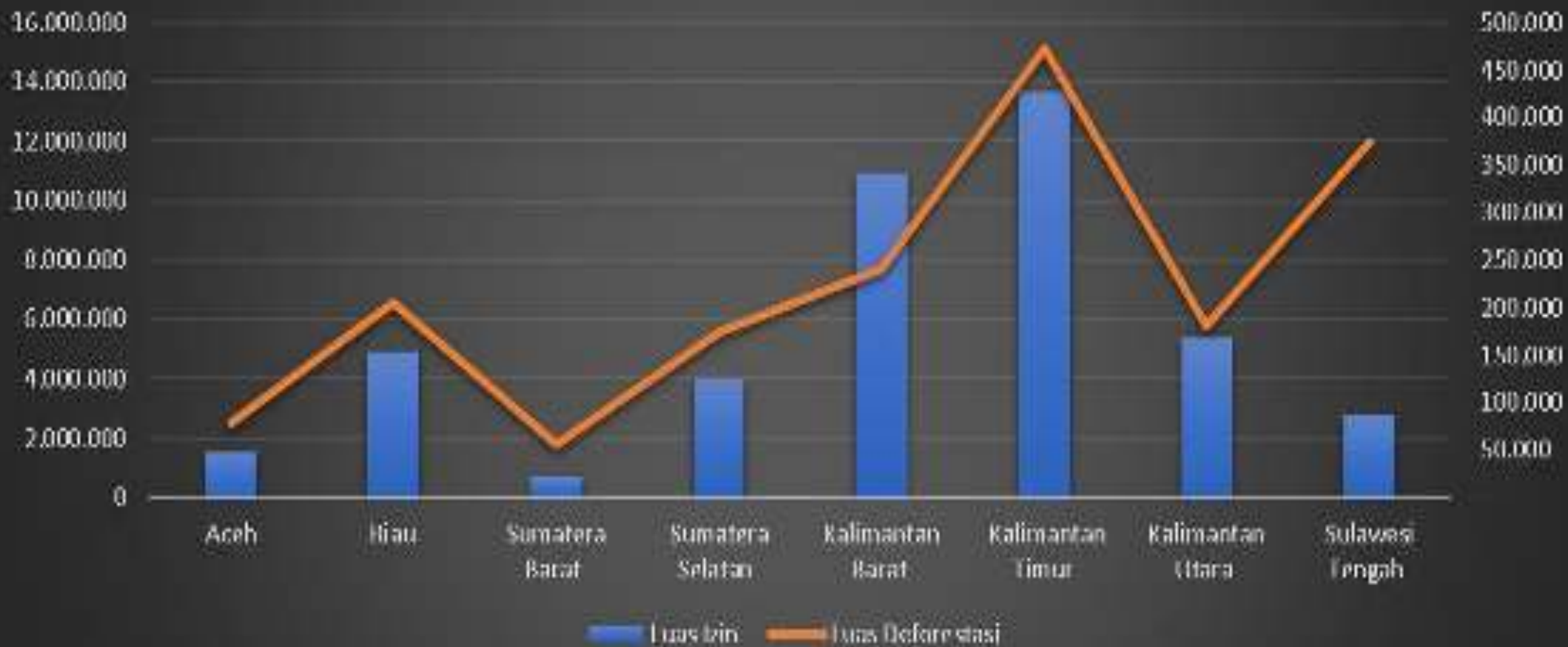
PERIODE 2009–2013

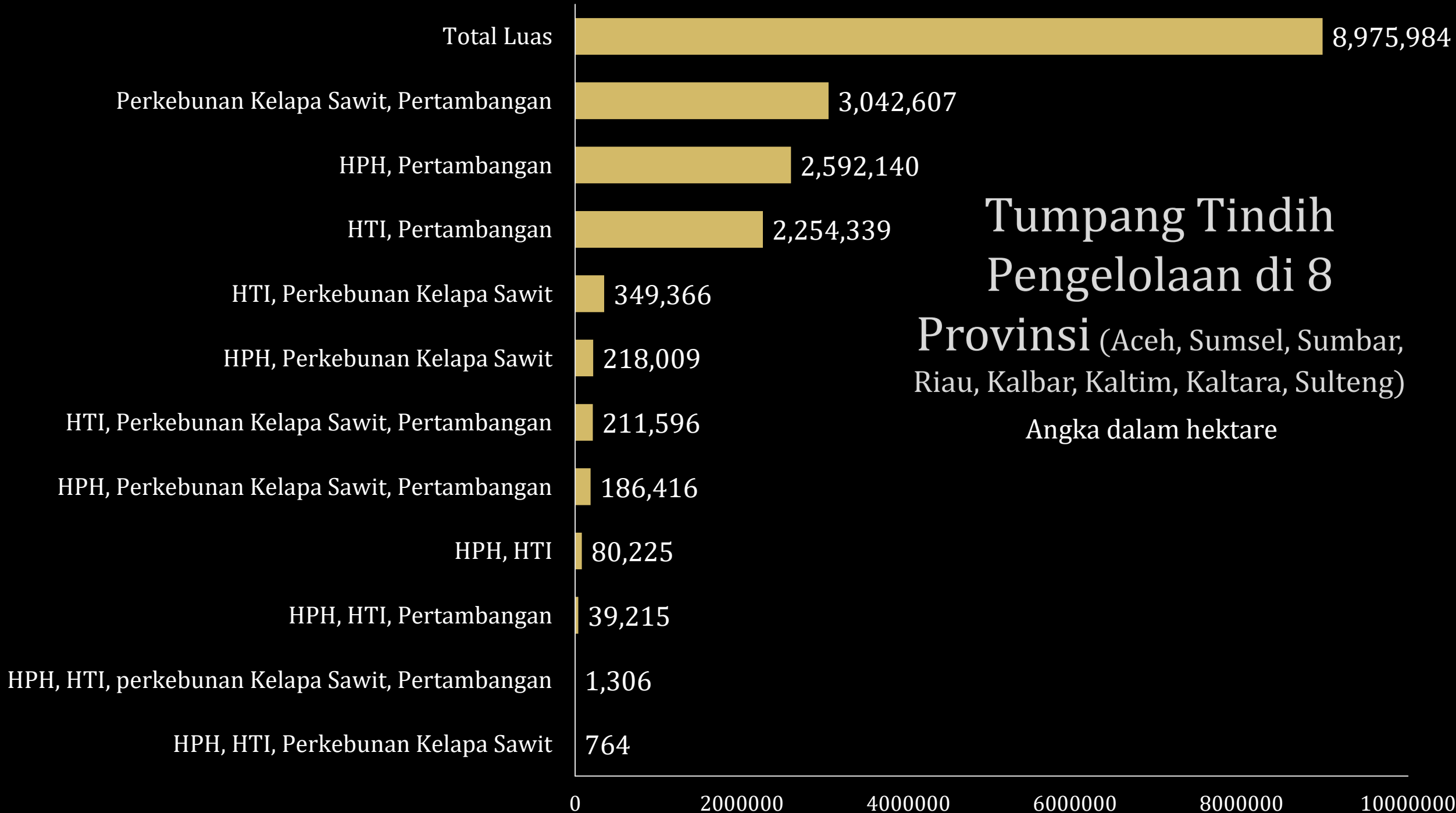
DEFORESTASI SELUAS 2 JUTA HEKTARE

PERIODE 2013–2016:

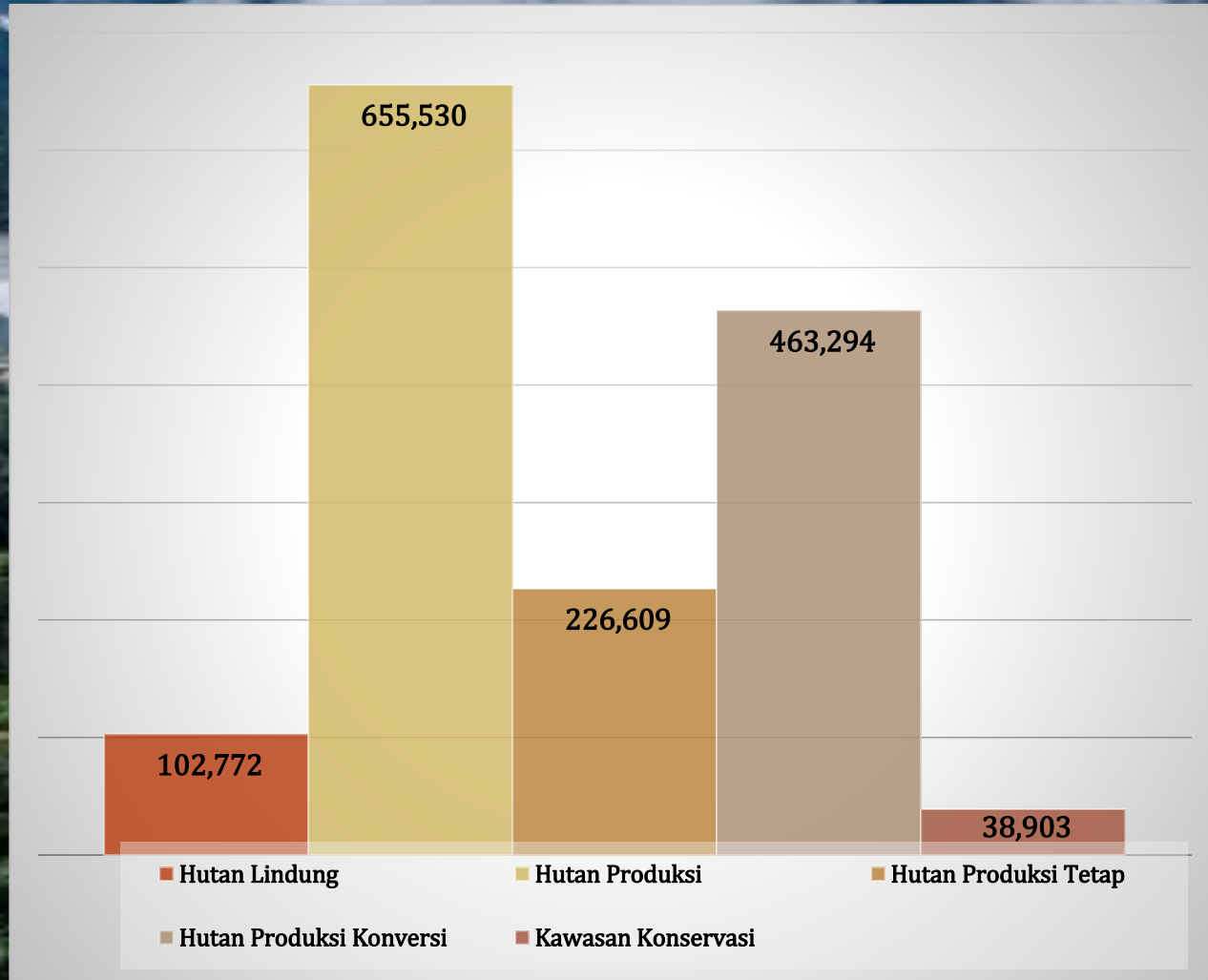
- Deforestasi seluas 1,78 juta hektare
- 1,04 juta hektare deforestasi dalam konsesi ijin
- Dari 738,816 hektare deforestasi di luar konsesi, 479,885 hektare berada dalam kawasan hutan dan 258,931 berada di APL

LUAS KONSESI IZIN DENGAN DEFORESTASI 2013-2016

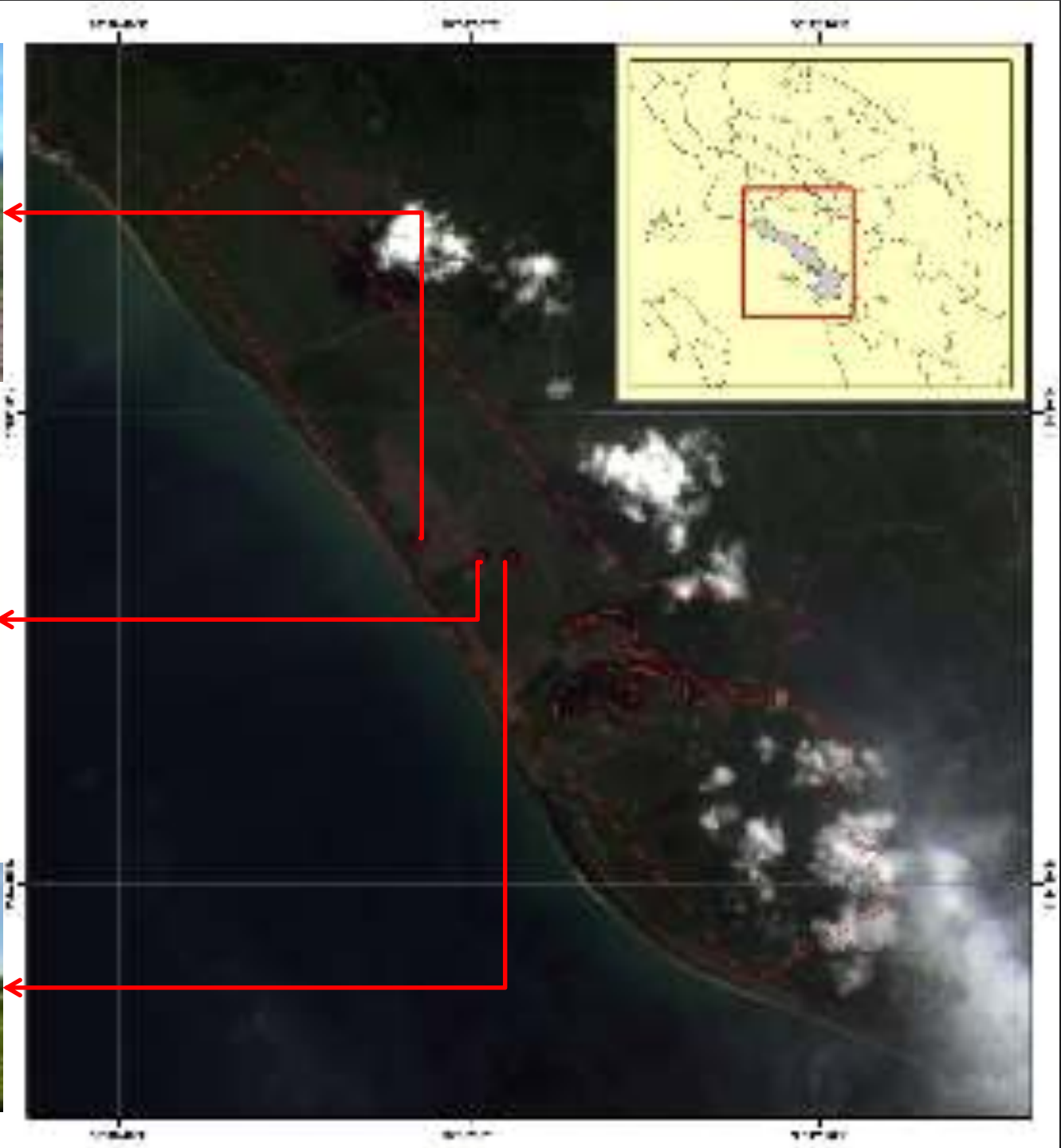




Izin Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di 8 Provinsi (Aceh, Sumsel, Sumbar, Riau, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulteng)



- ❖ Luas Sawit 8 provinsi : 11, 1 juta ha
- ❖ Sawit dalam APL : 9,63 juta ha
- ❖ Sawit dalam kawasan hutan : 1,49 juta ha
- ❖ Luas tutupan hutan dalam sawit 2016: 644,7 ribu ha
- ❖ Luas Deforestasi sawit di 8 provinsi 2013-2016: 215 ribu ha
- ❖ Luas Tutupan hutan dalam fungsi kawasan di dalam sawit : 165,3 ribu ha
- ❖ Deforestasi sawit dalam kawasan hutan tahun 2013-2016 : 25,6 ribu ha
- ❖ Luas sawit dalam gambut : 1,6 juta ha
- ❖ Deforestasi sawit di lahan gambut : 51,4 ribu ha



Perubahan tutupan hutan tahun 2005, 2013, 2015, dan 2017

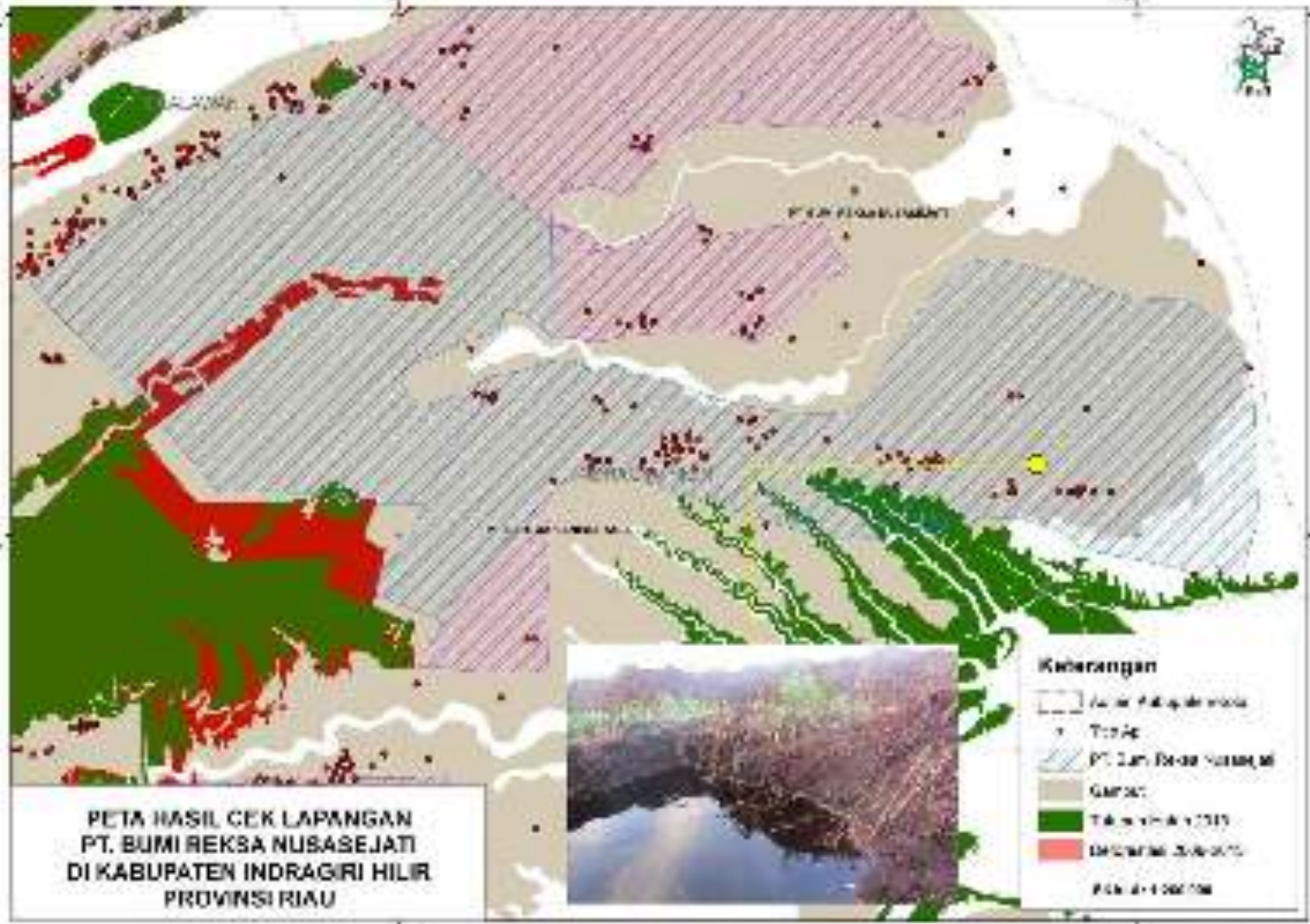


pada rentang tahun 2013-2016 terjadi deforestasi seluas 2.706 hektare di dalam area konsesi PT Teluk Nau



- Pantauan FWI menemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 2006-2016, jumlah titik api terbanyak berada di area perkebunan kelapa sawit
- 2,6 juta hektare lahan dan hutan telah terbakar antara bulan Juni dan Oktober 2015 (KLHK 2015, dalam Pertemuan Forum Komunikasi Data dan Informasi Bencana di Jakarta, 10 November 2015).

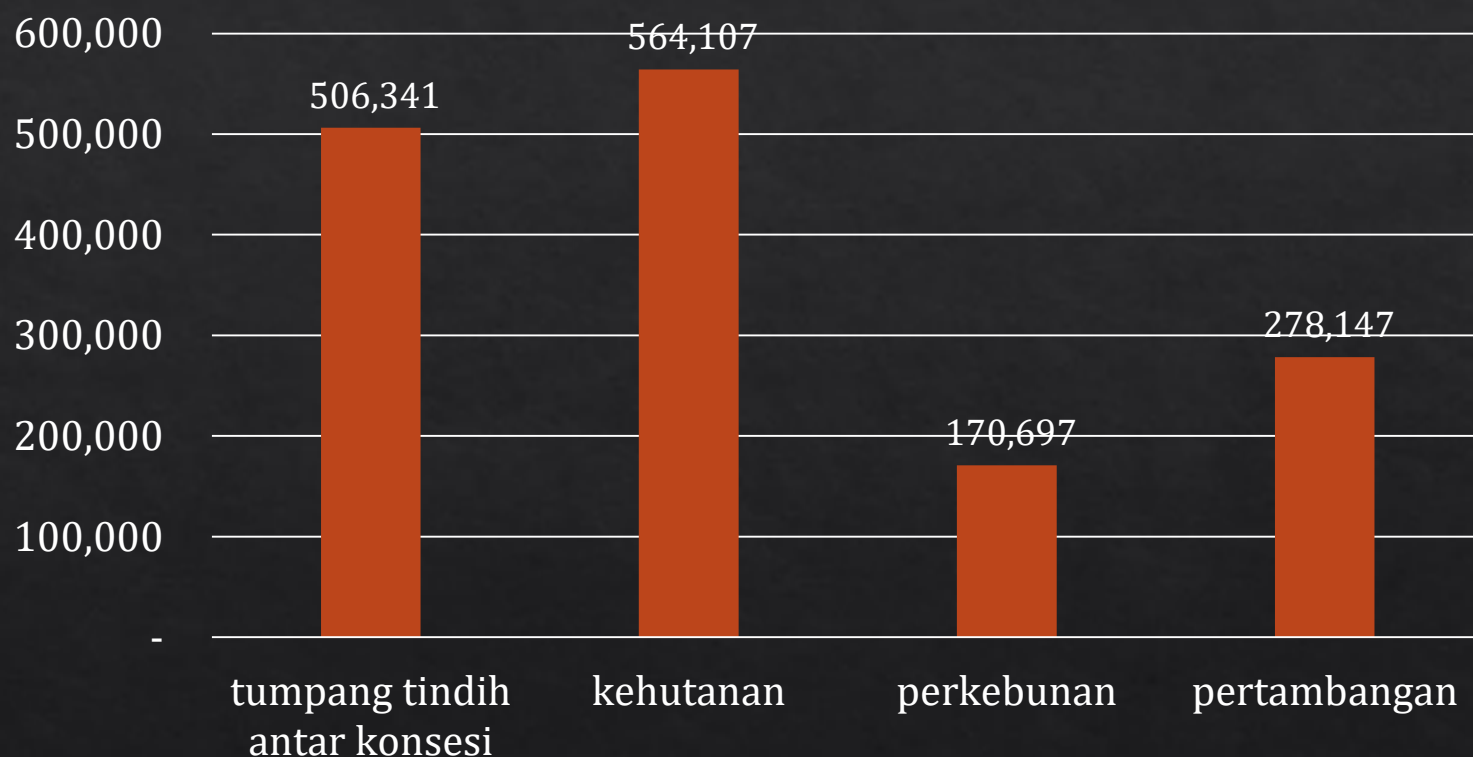
Firms 2006-2016, confident level >70%



PERMASALAHAN SOSIAL

Di sepanjang tahun 2015, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi sedikitnya 252 konflik agraria dengan total luasan wilayah konflik 400 ribu hektare dan melibatkan setidaknya 108.714 kepala keluarga (KK). Setengahnya atau 127 konflik di antaranya terjadi di sektor perkebunan dengan total luas area konflik 302 ribu hectare.

Tumpang Tindih antara Wilayah Adat dengan Konsesi di 8 Provinsi (Aceh, Sumsel, Sumbar, Riau, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulteng)



Terdapat sekitar 4 juta ha wilayah adat yang sudah dipetakan. Sekitar 1,5 juta ha diantaranya tumpang tindih dengan izin-izin pengelolaan hutan dan lahan.



PERJUANGAN KETERBUKAAN INFORMASI KEHUTANAN

“Dengan berjalannya waktu akan terdapat saat saat dimana Masyarakat Dalam bentuknya PTSP (KPKA) akan bisa membuka informasi yang ada di hutan. Saat ini, kami sebagai pemerintah akan berusaha untuk membuka informasi yang ada di hutan. Kami akan berusaha untuk membuka informasi yang ada di hutan. Kami akan berusaha untuk membuka informasi yang ada di hutan.”

Perjuangan Masyarakat Sipil
Membuka Akses Informasi
Ke Hutan

Perjuangan Masyarakat Sipil
Membuka Akses Informasi
Ke Hutan

Tanpa Front
Membuka Akses Informasi
Ke Hutan

1998

Membuka akses informasi ke 1
KPKA (KPKA) sebagai lembaga
yang mengelola hutan
negara

Membuka akses informasi ke 2
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

1999
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2000

Membuka akses informasi ke 3
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2001
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2002

Membuka akses informasi ke 4
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2003

Membuka akses informasi ke 5
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2004
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2005
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2006
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah

2007
KPKA sebagai lembaga yang
mengelola hutan negara
yang dikelola oleh pemerintah



Permohonan
Informasi ke
ATR/BPN

11 bulan (16 Sept 2015 – 22 Juli 2016)

Sengketa di
KIP

Banding di
PTUN

5 bulan (9 Agt - 23 Des 2016)

4 bulan (23 Des 2016 – 6 Mar 2017)

Kasasi MA

Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit se-
Kalimantan yang masih berlaku sampai tahun 2016

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

- Kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak
- Implementasi kebijakan kehutanan Nasional dan Daerah
- Menyelenggarakan pengelolaan hutan (Monitoring, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi)
- Menyiapkan peluang berusaha

Tantangan

- Transisi kelembagaan KPH pasca UU 23 tahun 2014
- Penguatan kapasitas kelembagaan – Leadership yang kuat - Inovatif
- Distribusi basis data informasi
- Akomodasi hak dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penggunaan lahan

PEMERINTAH - PEMDA

Forest Administration

- Perizinan
- Regulasi
- Pedoman
- Kebijakan publik lainnya

Forest Planning

- Penatagunaan hutan
- Renc Pengelolaan wilayah
- Monev
- Peran Liaison

KPH

Forest Management

- Tata hutan dan Rencana kelola wilayahnya
- Produktivitas hutan
- Rehabiltasi/Reboisasi
- Perlindungan, dsb

PSDA ADIL DAN BERKELANJUTAN

